

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 1986, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Listyawati, Hery, 2010, *Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Irigasi di Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman*, Tesis, Program Pasca Sarjana, Universitas Gadjahmada, Yogyakarta.
- Murad, Rusmadi, 2007, *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*, Mandar Maju, Bandung.
- Pigay BIK, Decki Natalis, 2000, *Evolusi nasionalisme dan sejarah konflik politik di papua*, Pustaka harapan, Jakarta.
- Rubaie, Achmad, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia Publishing, Malang
- Sitorus, Oloan dan Dayat Limbong, 2004 *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum* , Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria SW, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta.
- Sumardjono Maria SW, 2012, *Penyelesaian konflik atau sengketa pertanahan* seminar yang disampaikan pada RDPU komisi II DPR RI, Jakarta
- Soekanto, Soerjono 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soekanto Sorjono, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.
- Sarjita, 2005, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan* , Tugujogja pustaka, Yogyakarta
- Supandi, 2012 *Penegakan Hukum Agraria dan penyelesaian sengketa Pertanahan dalam Proses Peradilan*, makalah yang disampaikan dalam rangkaian diskusi “kebijakan Penyelesaian Pertanahan” Jakarta.
- Thalib, Hambali, 2009, *Sanksi Pemidaan Dalam Konflik Pertanahaan*, kencana prenatal media group. Jakarta.

Widjaja, Gunawan, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang no 20 Tahun 1961 Tentang pencabutan hak-hak atas Tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 1 tahun 1994 tentang ketentuan pelaksanaan keputusan presiden nomor 55 tahun 1993

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentinagn Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan